

## Catatan Jurnal Perempuan

# Remaja Putri: Korban Media?

Konon, kekerasan dalam media (media violence), dapat mengantar anak-anak untuk bersikap agresif dan anti sosial. Riset ini dimuat dalam jurnal "Pediatrics" di Amerika. Selain menimbulkan sifat negatif, kekerasan dalam media juga terbukti mampu meningkatkan rasa kecemasan mereka terhadap kekerasan dan imaji akan menjadi korban kekerasan. Itu mengapa keresahan banyak kalangan terhadap tayangan sinetron "Bunglon" menjadi cukup beralasan. Tayangan tersebut dianggap tidak lebih sebagai perayaan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, tanpa memiliki pesan yang jelas. Memang benar bahwa orang tua dapat meminimalisir dampak buruk media tersebut dengan memberikan pemahaman kepada anak-anaknya, namun tanpa regulasi dari negara yang jelas terhadap media, pada akhirnya hal ini hanya akan memindahkan beban kepada para orang tua, sementara media sendiri nampaknya tidak peduli akan dampak buruk yang ditimbulkannya.

Selain masalah kekerasan, perempuan termasuk remaja putri adalah target utama dunia advertorial. Akibatnya, media tidak menampilkan kebutuhan kaum perempuan, namun justru kebutuhan para pengiklan. Oleh media, remaja putri dibiarkan terobsesi oleh gaya hidup tertentu atau pada pencitraan yang diciptakan oleh iklan: kurus, berambut lurus, berkulit putih, harum, dan seterusnya.

Di tengah maraknya kasus eksploitasi seksual, pedofilia, kasus kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking), ditambah lagi dengan pendidikan seks yang kurang memadai, media seharusnya memberikan pendidikan agar remaja perempuan semakin mengenal hak-haknya.

Hak-hak remaja putri yang seharusnya dipahami oleh media antara lain adalah mendapatkan informasi yang benar, hak untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri, bebas dari diskriminasi, terlindung dari pelecehan, kekerasan dan eksploitasi seksual, mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mengakses dan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang kesehatan reproduksinya serta bebas dari ancaman praktek perdagangan manusia, pornografi, narkoba, dan sebagainya.

Upaya perlindungan hak-hak remaja perempuan tersebut tidak akan bisa

terlaksana begitu saja tanpa bantuan media massa baik cetak maupun elektronik. Sebab media terutama media visual kini adalah alat yang sangat strategis dalam menularkan gagasan-gagasan tersebut. Di banyak negara, pemerintahnya justru mewajibkan media untuk mengalokasikan waktu atau tempat untuk iklan layanan masyarakat yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai persoalan sosial.

Di Indonesia hal tersebut belum diberlakukan, media di Indonesia justru tidak memilah-milah pesan-pesan tersebut. Masyarakat sendiri juga lupa bahwa mereka harus turut melindungi kepentingan dan hak-hak remaja perempuan dari derasnya pesan media yang masuk. Dan jika perlu, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain, pemerintah harus ikut campur tangan dalam berbagai regulasi dalam rangka melindungi perempuan dan anak dari efek buruk media.

Sebenarnya ada sebuah teori yakni media literacy (melek media) yang menjelaskan cara-cara agar anak-anak dan remaja khususnya remaja putri mampu mengkritisi media, dan tidak terkena dampak buruk media, dan lagi-lagi orang tua bisa membantu mereka. Beberapa hal yang bisa diterapkan antara lain dengan membatasi jam menonton televisi, memonitor media apa saja yang dikonsumsi, mulai dari majalah, video, dan internet. Memberikan penjelasan yang mereka butuhkan, menanyakan perasaan mereka setelah menyaksikan atau membaca, membantu mereka agar mampu membedakan antara yang fiktif dan yang riil hingga mereka pun paham bahwa dalam dunia nyata, setiap kekerasan, pelecehan seksual, perdagangan manusia, dan sebagainya ada konsekuensinya, yakni hukum. (AV)